

MODUL PEMBELAJARAN
KOMUNIKASI DAN ADVOKASI KEBIJAKAN



Evi Satsipi

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

2022

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahilalamin, puji syukur disampaikan kepada Allah SWT yang telah mengkaruniakan kesehatan dan kemampuan untuk menyusun modul pembelajaran Komunikasi dan Advokasi Kebijakan bagi para mahasiswa yang ingin mempelajari bagaimana proses komunikasi advokasi kebijakan terjadi.

Dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih kepada civitas akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta yang telah memberikan kesempatan dalam menyusun buku ini yang berasal dari mata kuliah sebagai ajang kesempatan bagi mahasiswa karena mata kuliah ini menarik untuk diikuti dengan menerapkan fungsi dari ilmu komunikasi dan advokasi kebijakan. Persilangan kedua cabang ilmu sosial ini memberikan kekuatan dalam menganalisis fenomena komunikasi advokasi kebijakan baik di Indonesia maupun di dunia.

Sebagai sebuah karya tulis berupa modul, penulis menyadari masih banyak kelemahan dalam buku ini. Oleh karena itu saran dan masukan sangat diapresiasi untuk perbaikan versi yang lebih lengkap. Semoga sumbangsih karya tulis modul ini bermanfaat bagi dunia keilmuan Administrasi Publik di lingkungan FISIP UMJ.

Jakarta, 26 Desember 2022

Evi Satispi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
BAB I	
PENDAHULUAN	1
BAB II	
ANALISIS KEBIJAKAN	5
BAB III	
KOMUNIKASI KEBIJAKAN	7
BAB IV	
ADVOKASI KEBIJAKAN	9
DAFTAR PUSTAKA	14

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Model Komunikasi Shannon & Weaver	i
Gambar 2. Model Komunikasi Schramm	ii

BAB I

PENDAHULUAN

Sebelum mengenal lebih jauh mengenai mata kuliah Komunikasi dan Advokasi Kebijakan, ada baiknya untuk mengenal lebih awal dari prinsip dasar komunikasi. Komunikasi dikenal sebagai suatu tindakan satu arah (*linear*) atau lebih dalam aktivitas kehidupan manusia yang mana kesehariannya melakukan kegiatan komunikasi dengan lingkungan sosial, baik secara verbal atau non-verbal (Suherman, 2020: 1-2)¹. Dalam perkembangannya komunikasi telah menjadi *panacea* untuk semua penyakit sosial di Amerika Serikat dengan mengamati pentingnya komunikasi melalui tahap penyembuhan pasien, kesabaran pada kesakitan, bagaimana pasien mengelola tekanan (*stress*) mereka, dan bagaimana pasien mengikuti saran-saran medis oleh dokter mereka *Athena du Pre* (2005).

Teori komunikasi yang berkembang pada saat ini mengenal 3 pemahaman konsep dasar yang dikembangkan oleh Johr R. Wenburg, William W. Wilmot, Kenneth K. Sereno, dan Edward M. Bodaken dalam Suherman, 2020, diantaranya:

1. Komunikasi sebagai Tindakan Satu Arah

Memahami konsep komunikasi sebagai proses satu arah yang secara sederhana menggambarkan orientasi pada sumber dengan memiliki Batasan komunikasi ini mengisyaratkan sebagai bentuk kegiatan yang secara sengaja dilakukan oleh komunikator kepada komunikan untuk menyampaikan tujuan.

2. Komunikasi sebagai Interaksi

Batasan komunikasi selanjutnya ada pada proses interaksi yang menyamakan komunikasi dengan proses sebab-akibat atau aksi-reaksi sebagai faktor *feedback*.

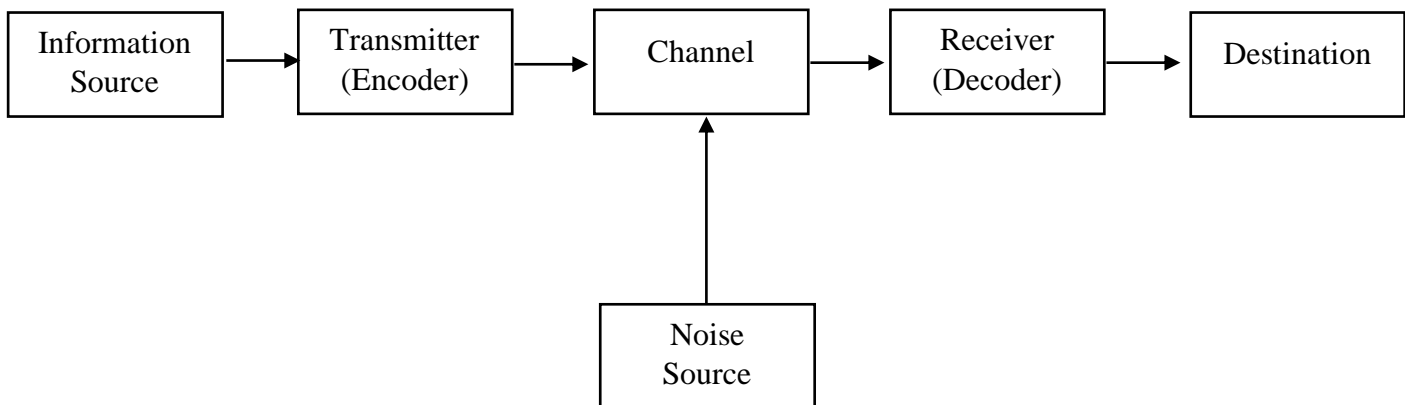
3. Komunikasi Transaksional

Batasan berikutnya pengembangan dari komunikasi sebagai interaksi, yaitu komunikasi transaksional lebih dalam dan tepat dimasukkan dalam tipe komunikasi interpersonal karena pengirim dan penerima pesan berbagi makna bersama mencapai kesepakatan. Jadi dapat dikatakan bahwa komunikasi merupakan penyampaian energi dari alat indera ke otak, dimana terdapat peristiwa penerimaan dan pengolahan informasi yang saling berpengaruh diantara berbagai sistem dalam diri organisme.

¹ Suherman, Ansar. 2020. Buku Ajar Teori-Teori Komunikasi. Yogyakarta: Deepublish Publisher. Hal 1-2.

Model komunikasi linear ala Shannon & Weaver dikenal dengan model matematis atau model teori informasi karena dalam model ini terdapat 6 karakteristik yaitu 1) komunikasi berlangsung dalam dua proses, 2) konsep gangguan (*noise*) dengan membuat komunikasi menjadi efektif, 3) model ini hanya dapat diterapkan dengan baik pada komunikasi interpersonal, 4) sumber informasi berperan aktif dalam proses pengiriman pesan, 5) tujuan berperan pasif dalam proses komunikasi, dan 6) dalam model ini terdapat umpan balik tidak begitu penting jika dibandingkan dengan pesan yang dikirim oleh sumber informasi. Yang tergambar di bawah ini (Gambar 1):

Gambar 1. Model Komunikasi Shannon & Weaver

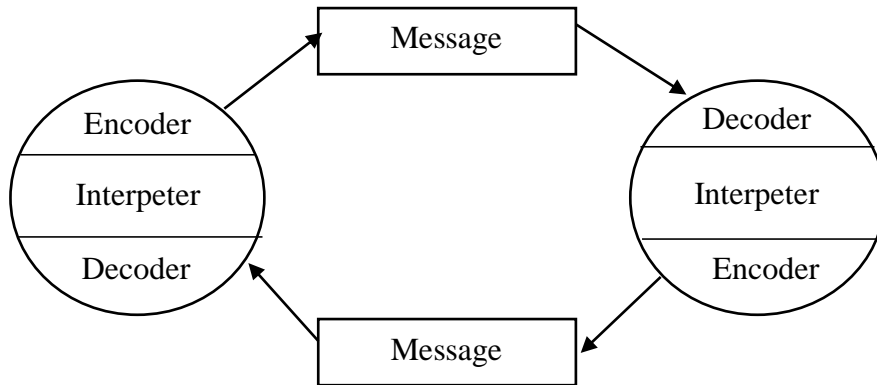


6 elemen di atas dapat dijelaskan 1) sumber informasi; orang yang membuat serta mengirimkan pesan bertugas untuk memilih jenis media yang digunakan dalam pengiriman pesan, 2) transmitter (encoder); orang yang menggunakan mesin untuk mengubah pesan jadi bentuk signal atau data biner dapat berupa individu, kelompok, atau mesin pengubah pesan, 3) channel; media yang digunakan untuk mengirim pesan, 4) receiver (decoder); mesin penerima dan pengubah signal atau data biner menjadi bentuk pesan atau penerima pesan yang menginterpretasikan pesan dari signal yang dikirim, 5) destination; pihak penerima pesan yang dituju oleh sumber informasi, 6) noise source; gangguan fisik dari lingkungan, manusia, dan lain sebagainya yang menghambat proses pengiriman serta penerimaan pesan namun dalam proses pengiriman pesan *noise source* sangat mungkin terjadi sebagai proses komunikasi terganggu.

Pada model komunikasi interaktif atau biasa dikenal model konvergensi melakukan aksinya dengan *TAKE* dan *GIVE* adanya umpan balik dari komunikasi, adapun komponen yang dibutuhkan agar berhasil dijalankan terdapat dua sumber yaitu pengirim dan penerima pesan, umpan balik berlangsung setelah pesan pertama diterima dan dikembalikan ke sumber aslinya, dan pada *field of experience* semua pengetahuan, perilaku, keyakinan, situasi, faktor psikologis

dan lain-lain dapat mempengaruhi isi pesan tetapi juga bagaimana interpretasi dalam pesan tersebut yang disampaikan. Dalam model Schramm (1954), tergambaran di bawah ini (Gambar 2):

Gambar 2. Model Komunikasi Schramm



komunikasi model Schramm di atas termasuk ke dalam model pertama yang dibuatnya sebagai model komunikasi dengan memberikan pengaruh besar dalam memfasilitasi penggunaan model komunikasi pada tahun 1950an, yang dikembangkan sebagai pengirim pesan – penerima pesan di awal 1940an didasarkan kepada teori peluru atau teori jarum hipodermik. *Encoder* atau biasa juga disebut *encoding* mengasumsikan sebuah bagian kritis dalam memulai prosedur koresponden dengan mengkonversi informasi data oleh pengirim pesan atau transmitter dan mengirimkannya kepada penerima pesan dan selanjutnya setelah itu dilakukan *decoder* atau biasa disebut *decoding* dengan menafsirkan data pesan melalui saluran media komunikasi.

Pada komunikasi transaksional menekankan pentingnya pengirim pesan dan penerima pesan dalam proses komunikasi dengan mengaitkan pada konteks sosial, hubungan dan budaya digambarkan sebagai ajang untuk pertukaran pesan dan membangun hubungan. Model komunikasi transaksional ala Dean C. Barnlund sangat populer dengan konsepnya mengenalkan dua jenis model komunikasi intrapersonal dan interpersonal. Adapun intrapersonal disebut sebagai intrapribadi yang mengandung makna bahwa proses komunikasi terjadi di dalam diri sendiri bagaimana pun juga rupanya kita termasuk sedang melakukan komunikasi dengan diri kita sendiri, misalnya proses berpikir termasuk kedalam model intrapersonal. Barnlund juga menyebut interpersonal sebagai proses interaksi di luar dari proses berpikir namun proses komunikasi antar individu terdiri lebih dari dua orang.

Sedangkan advokasi sebagai upaya, tindakan, strategi dan taktik, termasuk didalamnya lobi, pemasaran sosial, komunikasi, informasi, dan edukasi, serta pengorganisasian masyarakat yang ditujukan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan dan merubah kebijakan dalam

berbagai tipe dan tingkatan organisasi. Dalam kata lain, advokasi kebijakan berupaya untuk memperbaiki atau merubah suatu kebijakan publik sesuai dengan kehendak atau kepentingan mereka yang mendesakkan terjadinya perbaikan atau perubahan tersebut.

Oleh karena itu, menjadi penting untuk memahami apa sesungguhnya kebijakan publik itu sendiri. Salah satu kerangka analisis yang berguna untuk memahami suatu kebijakan publik adalah dengan melihat kebijakan tersebut sebagai suatu sistem hukum yang terdiri dari:

1. Isi Hukum (*content of law*), yakni uraian atau penjabaran tertulis dari suatu kebijakan yang tertuang dalam bentuk perundang-undangan, peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan pemerintah.
2. Tata Laksana Hukum (*structure of law*), yakni semua perangkat kelembagaan dan pelaksana dari isi hukum yang berlaku.
3. Budaya Hukum (*culture of law*) yakni persepsi, pemahaman, sikap penerimaan, praktek-praktek pelaksanaan, penafsiran terhadap dua aspek sistem hukum di atas, isi dan tata laksana-hukum.

Miller dan Covey (2005: 11-12) mengemukakan bahwa advokasi berkaitan dengan upaya mempengaruhi penguasa tentang masalah-masalah yang menyangkut rakyat, terutama mereka yang telah dipinggirkan dan dikucilkan dari proses politik. Dalam konteks ini, Miller dan Covey menegaskan bahwa advokasi merupakan proses perubahan dan transformasi sosial yang diarahkan untuk menciptakan hubungan-hubungan kekuasaan yang lebih demokratis di masyarakat, mendapat tempat dalam keputusan-keputusan publik, serta menciptakan lingkungan yang lebih sehat, aman dan produktif bagi kehidupan mereka.

Oleh sebab itu, komunikasi dan advokasi kebijakan adalah usaha untuk mempengaruhi kebijakan publik melalui berbagai macam bentuk komunikasi atau penetapan sebuah gerakan yang ditentukan oleh pihak yang berwenang untuk membimbing atau mengendalikan perilaku lembaga, masyarakat dan individu.

BAB II

ANALISIS KEBIJAKAN

Analisis kebijakan sebuah fakta yang muncul karena perumusan kebijakan yang ada tidak memuaskan apabila prosesnya berjalan demikian dalam paradigma kaum *deontologis* menilai proses lebih penting daripada hasil yang mana kemungkinan besar akan tidak berhasil. Dengan adanya teori analisis kebijakan mengikuti Schermerhorn (1993) teori adalah *a set of concept and ideas that explains and predict physical and social phenomena* dengan dua pemahaman yaitu *lay* dan *scientific theory*. Jadi dapat dikatakan analisis kebijakan adalah teori yang berasal dari pengalaman terbaik, dan bukan diawali dari temuan, kajian akademik, atau penelitian ilmiah, dengan pengembangan teori analisis kebijakan di masa depan akan semakin ditentukan oleh keberhasilan dan kegagalan-kegagalan yang terjadi di lingkungan administrasi publik.

Analisis kebijakan dalam administrasi publik berada dalam dilemma karena mendukung kekuasaan yang menjadi “teman sejawat” itulah sebabnya diperkenalkan model *deliberative policy analysis* yang diperkaya analisis kebijakan publik pada aras global untuk memberikan perspektif bahwa apa pun kebijakan publik yang kita buat tidak lepas dari tarik-menarik kepentingan global, termasuk kepentingan elite nasional pada aras global.

Pakar kebijakan publik, William N. Dunn, analisis kebijakan adalah aktivitas intelektual dan praktis yang ditujukan untuk menciptakan secara kritis menilai dan mengomunikasikan pengetahuan tentang dan dalam proses kebijakan. Proses analisis kebijakan versi Dunn diantaranya **pertama, merumuskan masalah** dengan nilai, kebutuhan, atau kesempatan yang belum terpenuhi yang dapat diidentifikasi, untuk kemudian diperbaiki atau dicapai melalui tindakan publik. masalah kebijakan mempunyai ciri 1) terdapat saling kebergantungan antar masalah kebijakan, 2) mempunyai subjektivitas, 3) buatan manusia karena merupakan produk penilaian subjektif dari manusia, dan 4) bersifat dinamis, sementara itu pada bagian **kedua, peramalan masa depan kebijakan** dengan mengacu kepada prosedur membuat informasi actual tentang situasi sosial di masa depan atas dasar informasi yang telah ada tentang masalah kebijakan, peramalan memiliki 3 bentuk, yaitu 1) ekstrapolasi, ramalan didasarkan atas proses memperkirakan nilai hari ini ke masa depan dan produknya disebut proyeksi dengan teknik analisis antarwaktu, estimasi tren linear, pembobotan eksponensial, transformasi data, katastrofi metodologi dan dengan asumsi dasar persistensi, keteraturan, dan reliabilitas-

validitas data. 2) teoretis, ramalan didasarkan pada teori dan prediksi sebagai produknya dengan teknik pemetaan teori, model kausal, analisis regresi, estimasi titik dan interval, analisis korelasi. 3) peramalan penilaian pendapat, ramalan didasarkan pada penilaian para ahli atau pakar dengan produknya disebut perkiraan dan tekniknya menggunakan delphi kebijakan, analisis dampak silang, penilaian fisibilitas yang bersifat untuk memperoleh dan menyintesis pendapat-pendapat para ahli. **Ketiga, rekomendasi kebijakan** dengan mengharuskan analisis kebijakan menentukan alternatif yang terbaik dan alasannya karena prosedur analisis kebijakan berkaitan dengan masalah etika dan moral yang didasarkan pada pernyataan advokasi seperti 1) dapat ditindaklanjuti; 2) bersifat prospektif; 3) bermuatan “nilai” – selain fakta; dan 4) etik.

Pakar kebijakan publik, Weimer-vining mengembangkan analisis kebijakan sebagai advis yang berorientasi kepada klien berkenaan dengan keputusan publik dan memuat nilai-nilai sosial (*policy analysis is client-oriented advice relevant to public decisions and informed by social values*) yang memahami sebuah kegiatan mengandung tiga nilai, pragmatis (*client-oriented*), mengacu kepada keputusan kebijakan publik, dan tujuan melebihi kepentingan klien melainkan kepentingan nilai-nilai sosial.

Profesi analisis kebijakan memungkinkan bekerja dengan eksekutif dan legislatif dengan memiliki isu pertama dengan kompetensi, seorang analisis kebijakan versi Weimer-vining harus (1) mempunyai kompetensi untuk mengumpulkan, mengorganisasikan, dan mengomunikasikan informasi di bawah tekanan tenggat waktu (*deadline*) yang ketat dan akses informasi yang terbatas, (2) analisis kebijakan harus mampu meletakkan masalah sosial dalam konteks-nya, (3) analisis kebijakan memerlukan keterampilan teknis yang memungkinkannya untuk membuat produksi dengan lebih akurat dan melakukan evaluasi konsekuensi kebijakan dengan lebih meyakinkan, (4) analisis kebijakan harus mempunyai pemahaman yang kuat tentang perilaku politik dan organisasi untuk memprediksi, dan kalau perlu memengaruhi, adopsi atau penerimaan kebijakan yang diadvikannya, (5) analisis kebijakan harus mempunyai etika dalam bekerja melayani klien.

Profesi analisis kebijakan perlu mengedepankan integritas analitis (*analytical integrity*), tanggung jawab kepada klien (*responsibility to the client*), dan loyalitas pada konsep seseorang tentang *good of society*.

BAB III

KOMUNIKASI KEBIJAKAN

Setelah mengetahui komunikasi secara prinsip, pada komunikasi kebijakan menurut Solichin Abdul Wahab, (2005) komunikasi kebijakan merupakan suatu komunikasi yang terjadi di dalam tubuh pemerintahan, sehingga dapat diterjemahkan merupakan suatu penyampaian pesan, program dan gagasan pemerintah kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan Negara. Sehingga komunikasi kebijakan juga tidak akan terlepas dari permasalahan dalam komunikasi organisasi.

Dalam menghadapi permasalahan sosial dengan pendekatan komunikasi, paling tidak mencoba menjawabnya dengan tiga pertanyaan penting dalam pikiran mereka, seperti

1. Bagaimana kita membuat orang berpikir tentang masalah- masalah kita?
2. Bagaimana kita membuat mereka berpikir tentang permasalahan kita termasuk cara mereka memecahkan masalahnya melalui kebijakan publik, tidak hanya melalui tindakan individu?
3. Bagaimana kita membuat mereka berpikir tentang isu-isu sedemikian rupa bahwa mereka ingin menyelesaikannya melalui kebijakan publik kita?

Orang-orang bukanlah sebuah “papan tulis kosong” maka diperlukan proses komunikasi kebijakan yang *compatible* dengan menghubungkan proses aktivitas analisis kebijakan, pembuatan materi, komunikasi interaktif, dan pemanfaatan pengetahuan. Dapat dikatakan komunikasi kebijakan bukan hanya proses pemberitahuan hasil kebijakan semata kepada *stakeholder* tetapi termasuk juga proses pengkomunikasian alur kebijakan mulai dari awal.

Setiap orang atau dalam konteks kebijakan adalah *stakeholder* memiliki perspektif serta pemikiran yang berbeda-beda. Oleh karena itu, jangan diasumsikan bahwa komunikasi dilakukan pada ruang kosong. Seorang *decision maker* harus siap dengan strategi-strategi dalam merespon perbedaan-perbedaan pandangan. Komunikasi itu interaktif guna menjaring preferensi dari semua *stakeholder*, maka komunikasi harus dilakukan secara interaktif melalui dua arah. Dengan begitu, akan memperkaya dan memperkuat dasar pengambilan kebijakan. Komunikasi bergema melalui nilai-nilai terdalam dan pandangan masyarakat dunia.

Membangun komunikasi yang efektif harus berbasis frame yang jelas. Sehingga memudahkan *stakeholder* dalam memahami pesan yang akan dimunculkan oleh seorang pengambil kebijakan. Dari perspektif politik, komunikasi yang berbasis frame merupakan langkah yang efektif untuk menggiring *stakeholder* untuk masuk ke dalam wacana-wacana

yang akan dibangun. Hal tersebut yang sekarang dilakukan oleh beberapa stasiun TV atau media massa yang mungkin berafiliasi dengan partai politik untuk menggiring pembaca ke dalam perspektif yang sebenarnya sudah dibangun sebelumnya.

Gunakan level pemahaman yang mampu merangkul *stakeholders*. Dalam komunikasi para kita perlu memahami terlebih dahulu adanya tingkat pemahaman yang berbeda dari setiap fakta. Tingkat pemahaman tersebut dibagi menjadi tiga yaitu:

1. Level idea misalnya keadilan, perdamaian, demokrasi dsb.;
2. Level *categorical issues* misalnya lingkungan, ekonomi, politik dsb.;
3. Level *specific issue* misalnya pembakaran hutan, pendanaan kampanye, pengangguran, dsb.

Untuk merangkul *stakeholder* diperlukan bahasa atau simbol yang menekankan kepada level ide. Pada level ini akan lebih mudah didapatkan konsensus dengan *stakeholder*. Sebaliknya semakin spesifik, maka kemungkinan akan terjadinya perbedaan pendapat dengan *stakeholder* semakin besar.

Analisis framing digunakan untuk membedah cara-cara atau ideologi saat mengkonstruksikan fakta. Analisis ini mencermati strategi seleksi, penonjolan, dan tautan fakta ke dalam berita agar lebih bermakna, lebih menarik, lebih berarti atau lebih diingat, untuk menggiring interpretasi khalayak sesuai perspektifnya (Sobur, 2001:162).

Context. Dalam menyampaikan pesan kepada *stakeholder*, kita perlu memperjelas konteks dari informasi yang disampaikan. Tanpa konteks seringkali suatu informasi tidak dapat dipahami atau bahkan kehilangan makna.

Penyajian data. Penyajian data statistik dianggap sebagai syarat yang harus dipenuhi untuk mendukung evidence. Namun demikian harus dipahami angka sendiri tidak punya makna apa-apa tanpa disertai dengan intepretasi yang tepat. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan data berupa angka. Pertama gunakan angka secara strategik yaitu bukan untuk mendramatisasi suatu masalah, tetapi memperlihatkan konsekuensi yang harus ditanggung jika mengesampingkan fakta yang disajikan. Kedua, manfaat angka untuk menggaris bawahi masalah efisiensi biaya atau untung rugi.

BAB IV

ADVOKASI KEBIJAKAN

Advokasi kebijakan adalah suatu proses terencana dan sistematis yang dilakukan untuk memperbaiki atau mengubah suatu kebijakan publik sesuai dengan kehendak atau kepentingan siapa yang mendesakkan terjadinya perbaikan dan peradahan tersebut dengan jalan mempengaruhi para penentu kebijakan.

Adapun unsur-unsur advokasi kebijakan diantaranya, sebagai berikut:

1. Proses yang terencana dan sistematis
2. Bertujuan memperbaiki atau mengubah suatu kebijakan
3. Kebijakan publik sebagai sasaran advokasi. Dalam pengertian ini, tercakup pula pembuatan suatu kebijakan publik bagi kepentingan bersama yang sebelumnya tidak ada.
4. Kehendak, merupakan aspirasi atau materi yang didesakkan, atau alternatif yang didesakkan untuk menggantikan kebijakan lama atau ditetapkan sebagai kebijakan baru
5. Pihak yang melakukan advokasi (mendesakkan kepentingan)
6. Pihak yang diadvokasi (didesak untuk melakukan perubahan atau menetapkan kebijakan), yaitu para penentu kebijakan. Penentu kebijakan itu bisa DPR, DPRD, pemerintah pusat, pemerintah daerah, kepala desa, ketua RW, ketua RT, dll.

Sedangkan langkah-langkah advokasi kebijakan 1) Membentuk lingkaran inti 2) Memilih isu strategis 3) Merancang Sasaran & Strategi 4) Mengolah Data dan Mengemas Informasi 5) Menggalang sekutu dan pendukung 6) Mengajukan Rancangan Tanding 7) Mempengaruhi pembuat kebijakan 8) Membentuk pendapat umum 9) Membangun basis gerakan 10) Memantau dan menilai program.

Ada 2 jenis advokasi:

1. Advokasi litigasi, yaitu advokasi yang dilakukan melalui jalur hukum ke pengadilan. Yang termasuk dalam jenis advokasi litigasi adalah *legal standing* dan *class action*

a. Legal Standing

Legal standing adalah tuntutan hukum di pengadilan yang dilakukan oleh orang-perorangan ataupun kelompok/organisasi yang bertindak untuk dan mewakili kepentingan publik tanpa harus didasarkan adanya kepentingan hukum dari tuntutan tersebut dan tanpa harus merupakan penderita ataupun adanya kuasa hukum dari mereka yang menjadi penderita.

b. Class Action

Class action dilakukan untuk tuntutan perdata yang biasanya terkait dengan permintaan ganti rugi yang diajukan oleh sejumlah orang atau kelompok tertentu.

Catatan:

Dalam Tata Hukum Indonesia, legal standing dan class action diatur dalam UU No.23 tahun 1977 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 38 dan 39 untuk legal standing serta pasal 37n untuk class action. Beberapa yayasan lingkungan hidup pernah melakukan strategi ini.

Meskipun selama ini strategi ini banyak dilakukan berkaitan dengan isu lingkungan hidup, namun sebenarnya strategi ini bisa dilakukan untuk berbagai isu di sekitar kita.

2. Advokasi non-litigasi, yaitu advokasi yang sifatnya lebih politis, antara lain advokasi kebijakan, kampanye media dan mobilisasi massa.

Langkah-langkah dalam Melakukan Advokasi

1. Menentukan isu

a. Sumber Isu

Isu adalah suatu realitas (kenyataan) sosial yang menjadi permasalahan nyata yang ada di sekeliling kita. Kesadaran akan adanya permasalahan ini harus dimunculkan dengan cara pengamatan, pemahaman, dan interpretasi (tafsir) kita terhadap realitas sosial yang melingkupi kehidupan kita sehari-hari karena bisa jadi apa yang sebenarnya merupakan suatu masalah tapi kita menganggapnya bukan masalah.

b. Alasan pemilihan isu

Dari hasil pengamatan, pemahaman, dan interpretasi terhadap realitas sosial, maka akan dihasilkan sekian banyak isu. Dengan melihat kemampuan kita, maka harus dilakukan pilihan terhadap prioritas isu mana yang harus digarap terlebih dahulu.

Pertimbangannya adalah:

- Sesuai dengan visi dan misi kita.
- Isu tersebut benar-benar penting dan mendesak.
- Syarat dengan kebutuhan dan aspirasi sebagian besar anggota masyarakat
- Dilakukan cek ulang terhadap masyarakat, apakah isu yang diangkat benar-benar merupakan isu mereka
- Berdampak positif pada pengadaan dan perabahan kebijakan-kebijakan publik

c. Mengetahui posisi isu secara hukum

Sebelum advokasi dilakukan, penting untuk mengumpulkan berbagai informasi berkaitan dengan peraturan atau undang-undang yang mengatur tentang isu yang akan diangkat. Hal ini penting dilakukan guna menjamin kita benar-benar mengetahui posisi hukum isu yang diangkat, resiko yang akan dihadapi dan celah-celah yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan advokasi dengan meminimalisir resiko.

2. Menentukan target yang ingin dicapai

Target di sini diartikan sebagai tujuan dan hasil (*out put*) minimal yang ingin dicapai. Ada 5 prinsip yang dapat digunakan dalam penetapan target, yaitu: Specific, Measurable, Achievable, Realistic, dan Time-bound yang disingkat dengan SMART.

- a. Specific (terfokus): apakah sasaran yang ingin dicapai spesifik dan jelas?
- b. Measurable (terukur): apakah hasilnya dapat diukur dan apakah ada indikator (alat ukur) yang jelas yang dapat digunakan untuk mengukurnya?
- c. Achievable (tercapai): apakah sasaran atau hasil yang ingin dicapai benar-benar dapat diwujudkan?
- d. Realistic (rasional): apakah sasaran atau hasil yang ingin dicapai adalah sesuatu yang wajar yang dapat diwujudkan?
- e. Time-bound (waktu): berapa lama waktu yang tersedia untuk mencapainya?

3. Mengumpulkan informasi dan melakukan penelitian

Suatu advokasi yang baik harus ditunjang oleh data yang credible (dapat dipercaya) dan valid (sah, benar). Data atau informasi ini dapat diperoleh dengan melakukan suatu penelitian yang ditujukan untuk memilih isu dan menemukan alternatif pemecahan masalahnya. Akses (ketercapaian) terhadap sumber informasi sangat penting dengan mengetahui jalur-jalur informasi di seputar isu yang diangkat dan contact person (orang-orang yang bisa dikontak) yang dapat membantu memperoleh isu tersebut.

4. Menentukan konstituen

Konstituen adalah sekelompok orang yang memiliki kepentingan kelompok, yang kita wakili dan orang-orang dari mana kita mendapat dukungan politik. Cara yang dapat dipraktikkan adalah dengan mengidentifikasi siapa yang berkepentingan dan yang diuntungkan dari isu yang diangkat. Konstituen bisa beragam kelompok kepentingan yang jelas, misalnya: kelompok petani, kelompok pengusaha kecil, kelompok pedagang, dll.

5. Melakukan analisis potensi dan ancaman

Dalam upaya mendesakkan maupun mengubah suatu kebijakan, maka tentu akan banyak tantangan yang akan menghadang. Oleh karena itu kita harus menganalisis potensi terlebih dulu untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan kita, yang meliputi 2 hal: analisis sumber daya dan analisis ancaman atau resiko yang akan dihadapi.

a. analisis sumber daya

Suatu rencana hanya akan tinggal rencana jika tak ada sumber daya yang cukup guna mewujudkannya. Sumber daya ini menjadi salah satu faktor penentu apakah rencana advokasi yang telah disusun dapat dilaksanakan atau tidak. Ada dua jenis sumber daya yang dilihat yaitu: (1) sumber daya manusia; terlibat dalam advokasi tersebut idealnya memiliki kriteria yaitu menguasai isu dan bahan-bahan yang akan diadvokasikan, mampu berkomunikasi dengan baik, memiliki cukup jaringan, memiliki kematangan emosi, ulet dan tak kenal putus asa, (2) sumber daya anggaran; meskipun uang bukan segalanya, namun harus diakui bahwa tanpa keberadaannya akan sulit melakukan suatu advokasi. Berapapun banyak uang atau anggaran yang kitamiliki akan menjadi pertimbangan untuk menentukan pilihan strategi advokasi.

b. analisis ancaman dan resiko

Isu yang kita pilih bisa jadi dianggap oleh orang lain (terutama penentu kebijakan) sebagai isu yang merugikan mereka, sehingga melakukan advokasi terkadang memiliki konsekuensi resiko. Oleh karena itu sejak awal kita harus sudah menyiapkan diri untuk menghadapi resiko-resiko tersebut.

6. Bergabung atau membangun koalisi

Tuntutan yang diajukan oleh banyak orang dan banyak kelompok kepentingan (lembaga) akan lebih didengar dibandingkan oleh satu orang dan atau satu lembaga saja. Oleh karena itu kita, perlu mencari dukungan mitra sebanyak mungkin yang bisa diajak untuk bekerja sama dalam suatu koalisi. Koalisi merupakan kerja sama antara beberapa individu atau kelompok atau organisasi untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Ada 2 keuntungan yang bisa diperoleh dari koalisi: (a) meningkatkan sumber, pengalaman, kredibilitas (perihal dapat dipercaya) dan visibilitas (kejelasan) advokasi, (b) meningkatkan kemungkinan perubahan kebijakan yang kita tuntut, tuntutan kita akan lebih didengar dan kemungkinan diraihnya sukses akan lebih besar. Dalam melakukan koalisi, kita bisa bergabung dalam suatu koalisi yang telah ada yang bisa memperjuangkan apa yang kita tuntut, atau dengan cara membangun suatu koalisi baru.

7. Mengidentifikasi peluang dan hambatan
Dalam advokasi perlu dilakukan analisis peluang yang bertujuan untuk mengidentifikasi keunggulan-keunggulan yang kita miliki dan hal-hal apa yang menjadi hambatan, siapa para penghambatnya, dan menyiapkan solusi untuk mengantisipasi dan mengatasinya. Hambatan ini bisa berwujud hambatan konstirusi, sistem, maupun kelemahan kita sendiri. Para penghambat biasanya berasal dari mereka yang merasa dirugikan jika advokasi itu berhasil mencapai tujuannya.
8. Menentukan strategi advokasi
Berdasarkan keaktifan dari siapa yang tengah melakukan advokasi, maka strategi advokasi dapat dibagi dalam 2 kelompok besar, yaitu: strategi advokasi yang proaktif dan strategi advokasi yang reaktif.
9. Melaksanakan agenda advokasi refleksi
Dua prinsip yang harus diingat dalam menjalankan agenda advokasi adalah kecepatan menangkap peluang dan ketepatan waktu bertindak. Oleh karena itu perlu diketahui tentang sistem pemerintah, sistem legislatif dan jadwal kerjanya, identifikasi pendukung dan penentang, siapa saja dari kalangan pembuat kebijakan yang memiliki visi dan misi yang sama dengan kita. Jika agenda advokasi telah dilakukan, maka harus dilakukan refleksi (mengenai apa saja telah kita lakukan).
10. Monitoring dan evaluasi
Monitoring dan evaluasi penting untuk kelanjutan advokasi karena kita akan mengetahui kelemahan dan kelebihan kita yang bisa dijadikan pedoman untuk menentukan langkah selanjutnya: apakah strategi yang digunakan sudah tepat atau perlu diganti, apakah isu yang diangkat sudah tepat dengan kebutuhan dan kepentingan saat itu.
Monitoring menciptakan kesempatan untuk berdiskusi tentang status perabahan kebijakan dengan para peserta yang terdiri dari pemerintah, masyarakat, praktisi bisnis, dan kelompok-kelompok lain yang memungkinkan untuk meningkatkan dukungan untuk kebijakan yang kita tuntut dan yang ingin dicapai. Evaluasi difokuskan pada pengaruh dan akibat.

DAFTAR PUSTAKA

- Chambers, Robert, 1996, *Participatory Rural Appraisal : Memahami Desa Secara Partisipatif*, Kanisius, Yogyakarta.
- Chandhoke, Neera, 1995, *State and Civil Society*, Sage Publications, New Delhi.
- Clark, John, 1995, *NGO dan Pembangunan Demokrasi*, Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Dahana, Bambang Tribuana (edt), *Tanpa tahun, Merawat demokrasi melalui Diskusi: Buku Panduan untuk Fasilitator*, Pact Indonesia-SKEPO-USAID, Jakarta.
- Department for International Development (DFID), 2000, *Manajemen Daur Proyek dan penggunaan Kerangka Kerja Logis*, DFID, Makasar.
- Esman, Milton J. dan Norman T. Uphoff, *Local Organizations*, 1988, Cornell University Press, Ithaca and London.
- Fauzi, Noer dan Yando R. Zakaria, 2000, *Mensiasati Otonomi Daerah: Panduan Fasilitasi dan Pemulihan Hak-hak Rakyat*, KPA-INSIST Press, Yogyakarta.
- Fernandes, Walter dan Rajesh Tandon, 1993, *Riset Partisipatoris Riset Pembebasan*, PT.Gramedia, Jakarta.
- FISIPOL UGM - Kantor Eks menteri Negara Masalah-masalah Kemasyarakatan, *Penyusunan Konsep Perumusan Pengembangan Kebijakan Pelestarian Nilai-nilai Kemasyarakatan (Social Capital) untuk Integrasi Sosial*, Laporan Penelitian.
- Friedmann, John, 1992, *Empowerment: The Politics of Alternative Development*, Blackwell Publishers, Cambridge MA USA & Oxford UK.
- Ife, Jim, 1995, *Community Development: Creating Community Alternatives - Vision, Analysis and Practice*, Longman, Australia.
- Khon Kaen University, 1990, *Rapid Rural Appraisal*, Siriphan Press, Thailand.
- Krisdyatmiko, *Pendidikan Politik Melalui Forum Warga*, 2002 (dalam Annual Report IRE Yogyakarta 2001 - 2002).
- Linz, Juan J dan Alfred Stepan, 1996, *Problems of Democratic Transition and Consolidation: Southern Europe, South America, and Post-Communist Europe*, The Johns Hopkins University Press, Baltimore and London.
- Mas'ood, Mohtar, *Negara, Kapital dan Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003.
- Mastuti, Sri dan Dian Kartikasari, 2001, *Panduan Advokasi Anggaran*, FITRA- KPI, Jakarta.
- Nugroho, Riant. 2008. *Public Policy*. Jakarta:PT Alex Media Komputindo.

- Prijono, Onny S dan AMW Pranarka (Edt), 1996, Pemberdayaan : Konsep, Kebijakan dan Implementasi, CSIS, Jakarta.
- Raharjo, Toto, dkk, 2001, Pendidikan Populer : Panduan Pendidikan untuk Rakyat, Pact-INSIST, Yogyakarta.
- Tan, Jo Hann & Roem Topatimasang, 2003, Mengorganisir Rakyat : Refleksi Pengalaman Pengorganisasian Rakyat di Asia Tenggara, SEAPCP & R EaD, Kuala Lumpur - Jakarta - Yogyakarta.
- Topatimasang, Roem - Mansour Fakih - Toto Rahardjo, 2001, Merubah Kebijakan Publik, Pustaka Pelajar-Read-INSIST-Pact Indonesia, Yogyakarta.
- Uphoff, Norman Thomas, 1986, Local Institutional Development: An Analytical Sourcebook with Cases, Kumarian Press, USA.
- Usman, Sunyoto, 1998, Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Zubaidah, Siti, Intervensi Program Strategis Dalam Rangka mengatasi Kemiskinan di Jawa Tengah, 2001 (download dari website: http://www.hayati-ipb.com/users/rudyct/indiv2001/siti_zubaidah.htm).